

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kelembagaan penyuluhan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan sumberdaya manusia dalam membangun pertanian. Secara umum kelembagaan penyuluhan melakukan tugas untuk meningkatkan kompetensi penyuluhan pertanian, melakukan terobosan inovasi teknologi pertanian, menyusun dan menyebarkan materi penyuluhan serta melakukan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh penyuluhan pertanian. Dengan harapan pembangunan pertanian kearah yang lebih baik dan peningkatan SDM yang berkualitas.

Beragamnya bentuk kelembagaan penyuluhan pertanian ditingkat Kabupaten/Kota mencerminkan beragamnya pula persepsi pemerintah daerah tentang penyuluhan pertanian, yang pada gilirannya akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas penyuluhan pertanian dalam mendukung keberhasilan program pembangunan daerah. Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian dan Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 tentang Kelembagaan Daerah, menimbulkan persepsi yang berbeda-beda terhadap lembaga penyuluh yang ada di tiap-tiap daerah. Persepsi yang berbeda-beda terhadap kebijakan publik tersebut, telah merubah struktur kelembagaan penyuluhan pertanian serta operasionalisasinya di daerah. Kondisi ini menyebabkan kinerja penyuluhan pertanian semakin menunjukkan penurunannya, karena penyelenggaraan penyuluhan pertanian ditempatkan pada posisi yang tidak tepat. Bahkan memasuki abad ke 21 kinerja penyuluhan pertanian dapat dikatakan mencapai titik terendah (Mardikanto, 2008).

Peran sistem pendidikan pertanian dalam difusi dan penerapan teknologi oleh petani bisa berlangsung dalam keluarga petani secara turun temurun, bila dalam proses tersebut tidak disertai perubahan teknologi, keluarga tersebut disebut melaksanakan pertanian tradisional. Tapi bila keluarga petani tersebut mengikut penyuluhan yang dilakukan oleh para penyuluh pertanian yang membawa misi

terjadinya penerapan teknologi pertanian yang baru, maka keluarga petani tersebut mempunyai peningkatan pengetahuan dan menjadi tempat percontohan bagi petani sekitarnya. Sasaran tugas penyuluhan pertanian adalah mempercepat proses adopsi teknologi di tingkat petani (Deptan, 2001).

Peningkatan kinerja penyuluh pertanian sangat menentukan pembangunan pertanian masa depan yang pada dasarnya untuk meningkatkan penghasilan sektor pertanian. Dengan demikian, sistem kelembagaan penyuluhan harus dibangun dan dikembangkan dalam upaya untuk membantu petani/nelayan dalam menciptakan iklim pendidikan/pembelajaran yang kondusif, sehingga pada akhirnya mereka mampu menolong dirinya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga (Deptan, 2007). Program penyuluhan pertanian merupakan rancangan kegiatan penyuluhan yang akan dilaksanakan di setiap wilayah kerja para penyuluh yang disusun secara tertulis dan sistematis. Dalam program penyuluhan ada empat unsur pokok yaitu: (1) keadaan merupakan informasi fakta atau data-data yang berkaitan dengan program penyuluhan, (2) tujuan di mana perubahan yang ingin dicapai dalam penyuluhan, (3) masalah adalah sesuatu yang harus dipecahkan baik sifatnya teknis maupun non teknis, dan (4) cara mencapai tujuan yang meliputi pengaturan waktu dan tempat pelaksanaan, penggunaan metode, teknik dan alat bantu penyuluhan, frekuensi penyuluhan dan kualitas penyuluh dalam menguasai materi (Dudung, 2010).

Penyuluhan pertanian yang efektif adalah dengan menjalin komunikasi yang baik dengan petani dilapangan guna terjalin kerjasama yang baik antara kinerja penyuluh dan petani. Beberapa masalah yang dihadapi dilapangan dalam upaya mempercepat pengembangan pembangunan pertanian adalah kondisi penyebarluasan inovasi teknologi melalui penyuluhan pertanian kepada daerah otonomi. Pemerintah telah melancarkan dan melaksanakan pembangunan dengan jalan yang meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan dari masyarakat yang umumnya miskin. Untuk itu para penyuluh pertanian diberi tanggung jawab untuk melaksanakan rencana tersebut (Deptan, 2001). Penyuluhan pertanian akan efektif apabila mengacu pada minat dan kebutuhan masyarakat. Harus dikaji secara mendalam apa yang harus menjadi minat dan kebutuhan yang dapat

menyenangkan setiap individu maupun segenap masyarakat. Penyuluh pertanian harus mengetahui kebutuhan apa saja yang dapat dipenuhi dengan ketersediaan sumberdaya yang ada. Dengan demikian akan dapat diprioritaskan minat serta kebutuhan yang mana yang diutamakan dalam kegiatan penyuluhan. Layanan sistim penyuluhan didasarkan pada pemikiran bahwa individu petani memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi dan dalam mengadopsinya untuk meningkatkan manajemen usahataniya serta memperbaiki kehidupan ekonominya (Subejo, 2008)

Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BAKORLUH) Provinsi Gorontalo secara umum mempunyai tugas dalam hal melakukan kegiatan pendampingan dan koordinasi antara berbagai instansi terkait di lingkungan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan se-Provinsi Gorontalo. Selain itu juga kedepannya badan ini di harapkan dapat lebih baik dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Kabupaten/Kota (Pusat Penyuluhan Pertanian dan Pengembangan SDM Pertanian, 2011).

Menindak lanjuti peran dari BAKORLUH Provinsi Gorontalo, Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Pohuwato melalui penyelenggaraan fungsi penyuluhan dalam bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan untuk meningkatkan peran sektor pertanian, lembaga ini dapat menjadi momentum dalam pengembangan sektor pertanian secara umum, dan menggali potensi pendayagunaan bagi masyarakat tani, BP4K Pohuwato juga melaksanakan kewenangan penyuluhan di Kabupaten Pohuwato dengan merumuskan kegiatan penyuluhan sampai pada proses evaluasi kegiatan penyuluhan lintas sektor (BP4K Puhuwato, 2012).

Dari uraian di atas terlihat bahwa peran dan arti kelembagaan penyuluhan pertanian kedepan menjadi harapan baik pemerintah maupun petani. Untuk mencapai peningkatan sektor pertanian yang baik, lembaga-lembaga penyuluhan pertanian mempunyai tanggung jawab besar, dalam mencapai peningkatan sektor pertanian tersebut peningkatan kinerja penyuluh haruslah lebih diperhatikan oleh pemerintah terkait agar nantinya tercipta penyuluh yang mampu memberikan

terbaik bagi petani. Untuk itu dibutuhkan lembaga-lembaga penyuluhan yang mau dan mampu memberikan yang terbaik bagi daerahnya.

Pentingnya kelembagaan penyuluhan pertanian maka akan dilakukan penelitian Analisis Kelembagaan “Analisis Hubungan Program BP4K dengan Kinerja Penyuluh” di Kabupaten Pohuwato.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan program BP4K dengan kinerja penyuluh?
2. Bagaimana kontribusi BP4K dalam program pertanian?

## **1.3 Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Hubungan program BP4K dengan kinerja penyuluh.
2. Kontribusi BP4K dalam program pertanian.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang analisis kelembagaan BP4K dalam program pertanian.
2. Sebagai bahan masukan bagi kalangan akademisi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan judul ini.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi obyek penelitian, terutama bagi pemerintah yang terkait dalam kelembagaan penyuluhan pertanian (BP4K).